

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
(LAKIP)**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2023 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten barito Timur, yaitu :

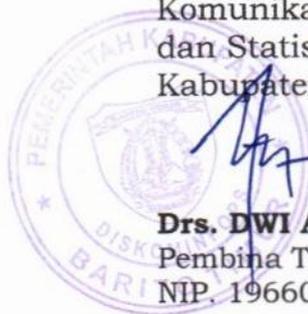
“Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah”

Sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Laporan Kinerja Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 ini Hasil pencapaian kinerja Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Kami berusaha dan berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah

yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kami menyadari belum dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan semua masukan serta saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi para pimpinan unit kerja lingkup Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur dan umumnya seluruh perangkat daerah di lingkungan Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur, sehingga mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Tamiang Layang, 8 Januari 2024

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika, Persandian
dan Statistik
Kabupaten Barito Timur,



Drs. DWI ARYANTO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660527 199203 1 007

DAFTAR ISI**HALAMAN**

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Dinas Komunifo-PS	3
1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	4
1.5. Aspek Strategis	6
1.6. Kekuatan Sumber Daya Manusia	7
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II PRERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2023.....	10
2.1.1. Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	10
2.1.1 Rencana Strategis.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	27
3.2 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.....	30
3.3 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Terhadap Target Kinerja Tahun 2018-2023	36
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	47

BAB IV PENUTUP	68
4.1 Tinjauan Umum	68
4.2 Sasaran dan Rekomendasi.....	69

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2018-2023	15
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023.....	17
Tabel 2.3 Target Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan StaistikTahun 2023	20
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	22
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023	25
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023	27
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2023	28
Tabel 3.3 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja sampai 2023	29
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2023	64

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian
dan Statistik..... 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) indikator dasar yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam hal ini Akuntabilitas merupakan manifestasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut.

Sebagai bagian pertanggung jawaban sebagaimana indikator akuntabilitas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selama Tahun 2023 sebagaimana dengan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Penyusunan LKIP juga harus selaras atau sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018, agar hasil kinerja yang ingin dicapai dalam perencanaan dapat diukur secara sistematis dan progresif.

Melalui LKIP, Pemerintah Kabupaten juga dapat mengevaluasi kinerja Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengkompilasi tolok ukur yang telah ditetapkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

- 11) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.
- 12) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2022 nomor 142)

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan ilustrasi analisis yang jelas, transparan, dan kredibel mengenai kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik selama Tahun 2023;
- 2) Membantu dalam mencermati berbagai dinamika permasalahan yang muncul sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik di tahun berikutnya.

1.4 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2022 nomor 142) sebagai berikut :

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

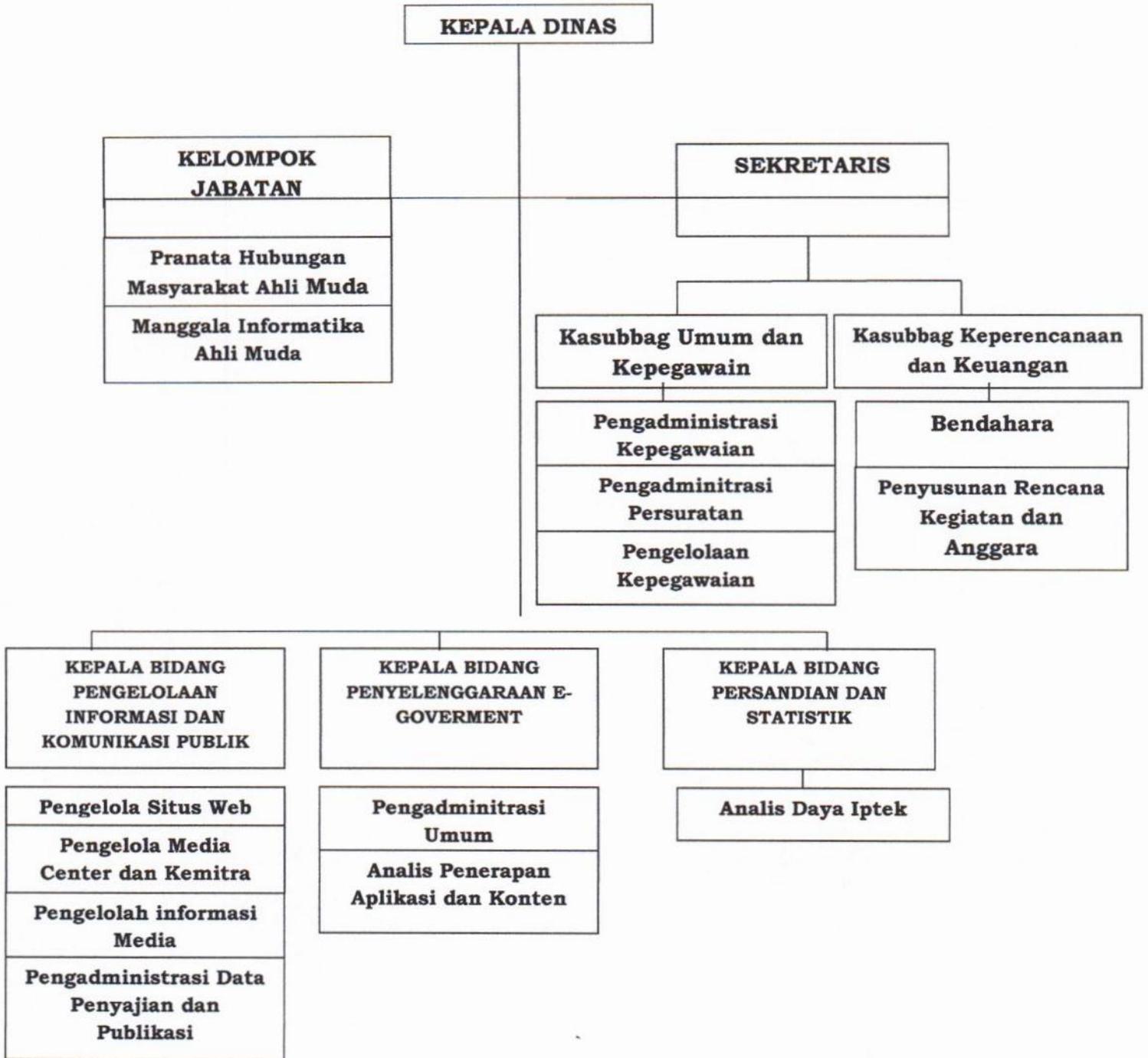
“Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah mempunyai tugas Pokok membantu Bupati Barito Timur dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang menyelenggarakan Fungsi;

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan komunikasi informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan pelaksanaan administrasi dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.4.2 berikut :

Gambar 1.4.2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur



1.5 Aspek Strategis

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik memiliki 4 (empat) aspek strategis dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu :

- 1) Menyediakan dan menyebarkan informasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- 2) Penyelenggaraan *E-Government* di daerah,;
- 3) Pengembangan ekosistem dan infrastruktur sumber daya informatika; dan Persandian dan Statistik
- 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas selaras dengan tujuan umum pembangunan yang ingin dicapai di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 yaitu :

- 1) meningkatkan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan TIK; dan
 - 2) mewujudkan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan media TIK ;
- Sepanjang 2022-2023 Dinas Komunikasi Informatika, persandian dan Statistik telah melaksanakan kegiatan meliputi :

- 1) Penyediaan dan penyebaran informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang;
- 2) Pengembangan dan pemanfaatan media elektronik baru sebagai sarana layanan informasi seperti website dan media sosial;

1.6 Kekuatan Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sebanyak 33 orang dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	19	57.57
2.	CPNS	1	03.03.
3.	PHT/PHL	13	39.40
	JUMLAH	33	100.00

Tabel 1.2 Komposisi Jenis Jabatan

NO.	JENIS JABATAN	JUMLAH	%
1.	JABATAN STRUKTURAL	7	35.00
2.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	-	0.0
3.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	13	65.00
	JUMLAH	20	100.00

Tabel 1.3 Komposisi Eselon

NO.	ESELON	JUMLAH	%
1.	ESELON II.B	1	03.03
2.	ESELON III.A	1	03.03
3.	ESELON III.B	3	09.09
4.	ESELON IV.A	2	06.06
5.	JF	3	09.09
6.	JFU	10	30.30
7.	PHT/PHL	13	39.39
	JUMLAH	33	100.00

Tabel 1.4 Komposisi Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH	%
1.	S2	4	12.12
2.	S1	14	42.42
3.	D3	-	0.00
4.	SLTA	14	42.42
5.	SLTP	1	03.03
	JUMLAH	33	100.00

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan,
 menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik serta struktur organisasi.
- 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Tujuan
 - 1.4 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
 - 1.5 Aspek Strategis
 - 1.6 Kekuatan Sumber Daya Manusia
 - 1.7 Sistematika Penulisan
- Bab II Perencanaan Kinerja,
 menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 yang selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2023
 - 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas Kinerja,
 Menguraikan analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan pengukuran kinerja 2023.
- 3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023.
 - 3.2 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023
 - 3.3 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik terhadap Target Kinerja Tahun 2018-2023.
 - 3.4 Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup,

menguraikan kesimpulan dari LAKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

4.1 Tinjauan Umum.

4.2 Saran dan Rekomendasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 nomor 142); Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Komunikasi Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan sesuai dengirn lingkup tugasnya di bidang Komunikasi Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- 2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Komunikasi Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya Bidang Komunikasi Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2023

2.1.1 Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Visi yang ingin diwujudkan adalah **“Terwujudnya Barito Timur yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah”**.

Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi:

- 1) Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultur, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan Perluasan Lapangan Pekerjaan;
- 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana bidang Keseharian, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia;
- 3) Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, Jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- 4) Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga; dan
- 5) Meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab;

Agenda misi yang terkait langsung dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik adalah poin angka (5) Meningkatkan Pemerintahan Daerah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dapat diwujudkan dengan mengedepankan penyelenggaraan *E-Government* yang menitik beratkan pada pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.

2.1.2 Rencana Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk pada tahun 2016 dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pemisahan Nomenklatur dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sekarang menjadi Dinas Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dan sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2022 nomor 142)

a. Visi dan Misi

Dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 sehingga memisahkan urusan bidang komunikasi dan informatika dalam Restra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2013-2023 sampai dengan tersususnya Dengan memisahkan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2013-2018, maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah **“Terwujudnya penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Handal, Dinamis, Berdaya Saing dan memberikan Nilai Tambah bagi Peningkatan Perekonomian Daerah”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Misi dengan konsep :

- 1) **Handal** artinya Dinas Komunikasi dan Informatika mampu berkarya sebagai *leading sector* pengelola dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi yang mampu memberikan pelayanan publik berupa penyediaan data dan informasi dengan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- 2) **Dinamis** artinya Dinas Komunikasi dan Informatika mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang termuktahirkan.

- 3) **Berdaya Saing** artinya Dinas Komunikasi dan Informatika mampu meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) **Memberi Nilai Tambah** artinya Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik mampu berinovasi menemukan dan menumbuhkan potensi sumber-sumber ekonomi daerah baru melalui teknologi informasi dan komunikasi.

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui misi tersebut sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Barito Timur yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu:

- 1) Menumbuhkan UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur
- 2) Meningkatkan pemafaatan masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informmasi kebijakan pemerintah melalaui media komunikasi publik, radio, televisi dan konvensional;
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik;
- 5) Meningkatkan keamanann komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 6) Meningkatkan transparansi dan publikasi data informamsi melalui pemanfaatan teknologi informasi;

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana Renstra tahun 2018 – 2023, dirumuskan berdasarkan tujuan yang telah diuraikan pada huruf b di atas adalah:

- 1) Tumbuhnya UMKM yang bergerak dalam usaha E-Commerce di Barito Timur;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik, radio, televisi dan konvensional;
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik;
- 5) Meningkatkan keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 6) Meningkatkan transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;

c. Indikator

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik menetapkan indikator sasaran sebagai pengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dalam Renstra. Indikator sasaran yang menjadi acuan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berasal dari Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, dimana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika telah dipisahkan sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik
Tahun 2018-2023

TUJUAN 1		SASARAN 2	INDIKATOR 3	
1.	Terwujudnya pertumbuhan UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur	Tumbuhnya UMKM yang bergerak dalam usaha E-Commerce di Barito Timur	1.	Jumlah UMKM di Barito Timur yang dilatih/diberdayakan dalam pemanfaatan media Online (e-Commerce)
			2.	Jumlah UMKM di Barito Timur yang menjalankan usaha melalui media Online (e-Commerce)
			3.	Jumlah angkatan muda kerja yang difasilitasi untuk memperoleh pelatihan TIK bersertifikat Standar Koptensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
2.	Terwujudnya pemanfaatan masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi	Meningkatkan pemanfaatan masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi	1.	Jumlah layanan internet di ruang public
			2.	Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau layanan telekomunikasi yang berkualitas
			3.	Jumlah Pengunjung /pengguna fasilitas internet di ruang public
			4.	Jumlah Petunjuk informasi sarana telekomunikasi
3.	Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik, radio, televisi dan konvensional	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik, radio, televisi dan konvensional	1.	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik radio
			2.	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi dan televisi milik pemerintah daerah
			3.	Jumlah pemirsas radio dan televisi milik pemerintah daerah
			4.	Jumlah Radio siara milik pemerintah daerah
			5.	Jumlah televisi kabel /UHF milik pemerintah Daerah
			6.	Jumlah desa yang diberikan bantuan pesawat radio dan televisi sebagai sarana informasi perdesaan
			7.	Prosentase jumlah relawan TIK terhadap desa di kabupaten Barito Timur
			8.	Jumlah kelompok informasi masyarakat / komunikasi kreatif bidang TIK
			9.	Jumlah fasilitas unit pusat komunikasi kreatif
			10.	Jumlah fasilitas unit layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID
			11.	Prosentase indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
			12.	Jumlah fasilitas unit Media Center milik pemerintah daerah
			13.	Jumlah berita kegiatan pemda yang dipublikasikan pada media massa/elektronik
			14.	Jumlah media luar dan konvensional yang didesiminasikan/dipublikasikan kepada masyarakat
			15.	Jumlah media sosial elektronik milik pemerintah daerah
			16.	Jumlah pengikut/follower/subscriber media sosial elektronik pemerintah daerah
			17.	Rasio pengaduan yang ditangani terhadap pengaduan yang diterima
			18.	Jumlah media pengaduan yang tersedia untuk masyarakat
			19.	Jumlah media massa / elektronik yang dibina

4.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik	1.	Jumlah kantor PD/UPTD terkoneksi internet/internet
			2.	Jumlah rata-rata kecepatan internet / bandwidth kantor PD/UPTD
			3.	Jumlah data center (server) milik pemerintah Daerah
			4.	Jumlah CCTV terpasang diruang publik dan fasilitas vital milik pemerintah daerah
			5.	Jumlah aplikasi milik pemerintah daerah yang terintegritasi
			6.	Jumlah dokumen perencanaan command center milik pemerintah daerah
			7.	Jumlah regulasi terkait penyelenggaraan TIK/E Government
			8.	Jumlah media website milik pemerintah daerah
			9.	Jumlah pengunjung website milik pemerintah daerah
			10.	Jumlah e-mail go.id untuk PD dan ASN pemerintah daerah
5.	Terwujudnya keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	1.	Rasio jumlah surat radiogram yang diterima dengan yang berhasil di distribusikan
			2.	Jumlah perangkat TIK PD yang diberikan /dilakukan pengamanan data
			3.	Jumlah produk statistik sektoral yang dihimpun dan dipublikasikan kepada masyarakat
6.	Terwujudnya transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	1.	Jumlah produk statistik sektoral yang dihimpun dan dipublikasikan kepada masyarakat

d. Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik menitik beratkan pada pengembangan penyelenggaraan *E-Government* di daerah dengan 3 (tiga) fokus utama yaitu (1) meningkatkan dan memberi dukungan yang memadai untuk tumbuh kembangnya UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur, dengan mengoptimalkan dukungan dalam pemberdayaan relawan TIK dan kelompok Informasi Masyarakat (KIM), memfasilitasi pembinaan dan pelatihan angkatan muda kerja melalui pelatihan TIK; (2) membangun peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internet dan infrastruktur telekomunikasi bagi masyarakat melalui optimalisasi dan peningkatan jaringan telekomunikasi dan penyediaan fasilitas internet diruang publik; (3) membangun sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui

sistem elektronik dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik radio, televisi dan konvensional.

e. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun 2023 diimplementasikan melalui 5 program yang terdiri dari sub program sebanyak 26 kegiatan, sebagai Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik
Tahun 2023

Program Prioritas		Program Penunjang	
Program/Kegiatan		Program/Kegiatan	
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
	1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.1. Perencanaan, Pengaanggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; 2. Layanan Hubungan Media; 3. Menyelenggarakan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		1.2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
	2.1. Pengelolaan e-Government Dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; 1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik; 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;		1. Penyediaan Gaji Dan Tugas ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
	3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik; 4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.		1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

			3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1.5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten Kota;		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik daerah yang Terintegritas		1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ; 1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.	Program penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		2. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
	4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /kota 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota 1. Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

Program Prioritas :

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

Program ini ditujukan untuk Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Layanan Hubungan Media, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini ditujukan Pengelolaan e-Government Dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik, Pengelolaan Pusat Data

Pemerintahan Daerah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik serta Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini ditunjuk sebagai Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten Kota untuk Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegritas

4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

Program ini di tunjuk sebagai Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /kota dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Program ini sebagai bagian dari penunjang kegiatan administrasi baik umum kepegawaian, Perencanaan maupun Keuangan untuk kelancaran kegiatan penunjang kegiatan Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Timur.

1.1 Rencana Kinerja Tahun 2018-2023

Target Kinerja Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Target Kinerja Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Staistik
Tahun 2023

Sasaran		Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)		Target sampai 2022	
				Jumlah	(Prosentase)
1		2	3	4	
1.	Tumbuhnya UMKM yang bergerak dalam usaha E-Commerce di Barito Timur	1.	Prosentase Jumlah UMKM di Barito Timur yang dilatih/diberdayakan dalam pemanfaatan media Online (e-Commerce)	0	0%
		2.	Prosentase Jumlah UMKM di Barito Timur yang menjalankan usaha melalui media Online (e-Commerce)	0	0%
		3.	Prosentase Jumlah Angkatan muda kerja yang di fasilitasi untuk memperoleh pelatihan TIK bersertifikat Standar Kopentensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	0	0%
2.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah	1.	Jumlah Layanan Internet diruang Publik	1	75%
		2.	Jumlah Desa/Keluaran yang terjangkau layanan telekomunikasi yang berkualitas	41	70%
		3.	Jumlah pengunjung /pengguna fasilitas internet diruang publik	182.776	100%
		4.	Jumlah petunjuk informasi sarana telekomunikasi	0	0%
3.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik, radio, televisi dan konvensional	1.	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik radio	0	0%
		2.	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi dan televisi milik pemerintah daerah	0	0%
		3.	Jumlah pemirsa radio dan televisi milik pemerintah daerah	0	0%
		4.	Jumlah Radio siara milik pemerintah daerah	0	0%
		5.	Jumlah televisi kabel /UHF milik pemerintah Dearah	0	0%
		6.	Jumlah desa yang diberikan bantuan pesawat radio dan televisi sebagai sarana informasi perdesaan	0	0%
		7.	Prosentase jumlah relawan TIK terhadap desa dikabupaten Barito Timur	0	0%
		8.	Jumlah kelompok informasi masyarkat / komunikasi kreatif bidang TIK	0	0%
		9.	Jumlah fasilitas unit pusat komunikasi kreatif	0	0%
		10.	Jumlah fasilitasi unit layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID	0	0%
		11.	Prosentase indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	0	0%
		12.	Jumlah fasilitas unit Media Center milik pemerintah daerah	0	0%
		13.	Jumlah berita kegiatan pemda yang dipublikasikan pada media massa/elektronik	7700	100%
		14.	Jumlah media luar dan konvensional yang didesiminasikan/dipublikasikan kepada masyarakat	0	0%

		15.	jumlah media sosial e elektronik milik pemerintah daerah	4	100%
		16.	Jumlah pegikut/follower/subscriber media sosial elektronik pemerinta daerah	1000	100%
		17.	Rasi pengaduan yang ditangani terhadap pengaduan yang diterima	0	0%
		18.	Jumlah media pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	2	100%
		19.	Jumlah media massa / elektronik yang dibina	2	100%
4.		1.	Jumlah kantor PD/UPTD terkoneksi internet/internet	37	100%
		2.	Jumlah rata-rata kecepatan internet / bandwidth kantor PD/UPTD	12	100%
		3.	Jumlah data center (server) milik pemerintah Daerah	9	100%
		4.	Jumlah CCTV terpasang diruang publik dan fasilitas vital milik pemerintah daerah	0	0%
		5.	Jumlah apilkasi milik pemerintah daerah yang terintegritasi	9	100%
		6.	Jumlah dokumen perencanaan coomand center milik pemerintah daerah	0	0%
		7.	Jumlah regulasi terkait penyelenggaraan TIK/E Government	1	100%
		8.	Jumlah media website milik pemeintah daerah	22	100%
		9.	Jumlah pengunjung website milik pemeintah daerah	182.887	100%
		10.	Jumlah e-mail go.id untuk PD dan ASN pemerintah daerah	3.508	6.496 %
5.	Meningkatkan keamanann komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	1.	Rasio jumlah surat radiogram yang diterima dengan yang berhasil di distribusikan	0	0%
		2.	Jumlah perangkat TIK PD yang diberikan /dilakukan pengamanan data	0	0%
		3.	Jumlah produk statistik sektoral yang dihimpun dan dipublikasikan kepada masyarakat	2	0%
6.	Meningkatkan transparansi dan publikasi data informamsi melalui pemanfaatan teknologi informasi	1.	Jumlah produk statistik sektoral yang dihimpun dan dipublikasikan kepada masyarakat	1	100%
7.	Meningkatkan Efektifitas Efisiensi pelaksanaan administrasi perkantoran	1.	Jumlah jasa komunikasi, sumber,daya air, listrik, dalam setahun	4	100%
		3.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dalam setahun	1	50%
		3	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan dan perkantoran dalam setahun	27	100%
		4.	Jumlah Peralatan kebersihan dalam setahun	96	100%
		5.	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dalam setahun	25	100%
		6	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor tersedia dalam setahun	1	100%
		7.	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan tersedia dalam setahun	1	100%
		8.	Jumlah komponen intiansi Listrik/penerangan yang tersedia dalam setahun	70	100%
		9.	Jumlah kegiatan rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang terlaksana dalam setahun	11	79%
		10.	Jumlah kegiatan rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang terlaksana dalam setahun	393	83%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang memberikan tugas dan yang menerima tugas,serta pertanggungjawaban kinerja kedua belah pihak dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan pertimbangan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap target indikator kinerja sehingga dapat dijadikan sumber parameter/ukuran keberhasilan pelaksanaan di setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan komitmen dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya sebagaimana Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran;	Prosentase jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dalam setahun (4 Jenis dan 12 bulan);	4 Jasa
2.	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara dalam setahun (1 Unit Mobil)	100 %
3.	Tersedianya Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran dalam setahun (31 orang)	100 %
4.	Tersedianya peralatan kebersihan sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase Jumlah peralatan kebersihan dalam setahun (59 Buah)	100 %

5.	Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah peralatan Kerja yang terpelihara dalam setahun (25 Unit)	100 %
6.	Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah Alat Tulis Kantor tersedia dalam setahun (1 Paket)	100 %
7.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia dalam setahun (1 Paket)	100 %
8.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam setahun (190 buah)	100 %
9.	Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai, kegiatan rapat dan konsumsi tamu sebagai pendukung kegiatan administrasi perkantoran	a) Prosentase jumlah kegiatan rapat yang dibiayai dalam setahun (2 Kegiatan Rapat); b) Prosentase Jumlah Tamu yang megkonsumsi makan dan minum dalam setahun	a. 100 % b. 100%
10.	Tersedianya pembiayaan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagai penunjang kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dalam setahun (31 Orang/ Kegiatan)	100 %
11.	Tersedianya pembiayaan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagai penunjang kegiatan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dalam setahun	43 %
12.	Tersedianya peralatan/perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase jumlah perlengkapan kantor, dapur dan rumah tangga (1 Unit)	100 %
13.	Meningkatnya kemampuan/keahlian pegawai dalam bidang TIK dan E-Government	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti/memperoleh pelatihan bidang TIK dan E-Government	0%
14.	Tersedianya dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja)	Jumlah jenis pelaporan yang disusun dalam setahun (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja) (6 Jenis Dokumen/Pelaporan)	6 Dokumen
15.	Tersedianya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik, radio, televisi dan konvensional	a) Peningkatan jumlah media sosial elektronik milik pemerintah (4 medsos) b) Peningkatan jumlah pengikut/follower masyarakat dalam media sosial resmi pemerintah daerah (7700)	a) 100 % b) 100%

		c) Peningkatan jumlah media pengaduan yang tersedia untuk masyarakat (0 media) d) Peningkatan jumlah media luar ruang dan konvensional yang didesiminakan /dipublikasi kepada masyarakat	c) 0% d) 0%
17.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Daerah melalui sistem elektronik	1. Jumlah data center (server) milik pemerintah daerah (1 server) 2. Peningkatan jumlah media sosial elektronik milik pemerintah (4) 3. Peningkatan jumlah pengikut/follower masyarakat dalam media sosial resmi pemernitah daerah 7700 Follower) 4. Peningkatan jumlah media pengaduan yang tersedia untuk masyarakat (0 Media) 5. Peningkatan Jumlah media luar ruang dan konvensional yang didesiminasikan /dipublikasikan kepada masyarakat	100% 100% 100% 0% 0%
18.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik	a) Jumlah kantor PD/UPTD terkoneksi internet/intranet (25 PD) b) Jumlah data center (server) milik pemerintah daerah (1 Server) c) Jumlah CCTV terpasang diruang publik dan fasilitas vital milik pemerintah daerah (6 titik) d) Jumlah aplikasi milik pemernitah daerah yang terinteritas (3 Aplikasi) e) Jumlah dokumen perencanaan command center milik pemerintah daerah (1 dokumen) f) Jumlah regulasi terkait penyelenggaraan TIK/E-Government (1 regulasi) g) Jumlah media website milik pemeintah daerah (5 domain/subdomain) h) Jumlah pengunjung website milik pemeintah daerah (190. Pengunjung) i) Jumlah e-mail go.id untuk PD dan ASN pemerntah daerah (54)	a. 144% b. 100% c. 100% d. 133% e. 100% f. 100% g. 100% h. 113% i. 6.496%
19.	Meningkatkan Keamanan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	a) Rasio jumlah surat radiogram yang diterima dengan yang berhasil di distribusikan (0 Surat) b) Jumlah Perangkat TIK PD yang diberikan /dilakukan pengamanan data (43 Unit)	a.0 % b.100 %
20.	Meningkatkan transparansi dan publikasi data informasi teknologi informasi	Jumlah produk statistik sektoral yang dihimpun dan dipublikasikan kepada masyarakat (2 Buku)	100%

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
I.	Program penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.701.900	APBD
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	26.501.900	APBD
	2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	20.200.000	APBD
2.	Addministrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.293.921.998	APBD
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.104.557.398	APBD
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	160.680.	APBD
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.684.600	APBD
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	21.000.000	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.468.750	APBD
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribudnya	16.468.750	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.293.830	APBD
	1. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	680.000	APBD
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	68.522.780	APBD
	3. Penyediaan bahan Logistik	11.473.950	APBD
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	16.657.100	APBD
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosnultasi SKPD	193.960.000	APBD
5.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	567.688.800	APBD
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	355.804.800	APBD
	2. Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	211.884.000	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341.499.477	APBD
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.569.477	APBD
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	331.930.000	APBD
II.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.696.848.500	
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.696.848.500	APBD
	1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	35.804.500	APBD
	2. Layanan Hubungan Media	40.000.000	APBD
	3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemintraan komunitas	1.621.044.000	APBD
III.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	387.007.250	
1.	Pengelolaan E-Government Dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	387.007.250	APBD
	1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran pemerintah Berbasis Elektronik	123.478.680	APBD
	2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	221.843.570	APBD

	3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Elektronik	0	APBD
	4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	41.685.000	
IV.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.667.000	APBD
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup kabupaten/Kota	83.667.000	APBD
	1. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	42.973.000	APBD
	2. Pengembangan Infrastruktur	40.694.000	APBD
V.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	62.213.000	APBD
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.180.000	APBD
	1. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur	52.180.000	APBD
2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	10.033.000	APBD
	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.033.000	APBD
	TOTAL	5.787.310.505	APBD

Memperhatikan Tabel 2.4, maka ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang yang terkait langsung dengan Target Kinerja pada Tabel 2.3. Hal itu karena hanya ada 3 (tiga) Program dan Kegiatan Prioritas yang mengakomodir sasaran Indikator Target Kinerja tersebut yaitu (1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; (2) Program pengelolaan Aplikasi Informatika; (3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; (4) Program penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi. Sedangkan Program dan Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran disusun berdasarkan kebutuhan urusan bidang kesekretariatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, maka LKIP Tahun 2023 akan mereview hasil pencapaian dari pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang kemudian diselaraskan dengan Indikator Kinerja Tahun 2018-2023.

Pengukuran kinerja dalam LKIP ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 yang dibandingkan dengan Indikator Kinerja Renstra 2018-2023. Sehingga kemudian dapat dilihat sejauh mana konsistensi SKPD dalam pelaksanaan program kerja yang secara sistematis dan selaras antara RPJMD, Renstra, Renja dan RKA/DPA.

Tabel pencapaian kinerja tahun 2023 dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Penunjang sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkannya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi public, radio, televisi dan konvensional	a) Peningkatan Jumlah fasilitas unit layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID (0 Fasilitas)	0%	0	0%
		b) Peningkatan jumlah berita kegiatan pemda yang dipublikasikan pada media massa/ Elektronik (7700 Berita)	100%	5581	725%
		c) Peningkatan Jumlah media social elektronik milik pemerintah (4 Medsos)	100%	4 Medsos	100%
		d) Peningkatan Jumlah pengikut/follower masyarakat dalam media sosial resmi pemerintah daerah (7700 Follower)	100%	3142 Follower	408%
		e) Peningkatan jumlah media pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	0%	0 Media	0%
		f) Peningkatan Jumlah Media Luar Ruang dan konvensional yang di	100%	56 Media	100%

		desiminasikan kepada masyarakat (58 media)			
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik	a) Jumlah Kantor PD/UPTD terkoneksi interanet (25 PD)	100%	36 PD	144%
		b) Jumlah Data Center (server) milik pemerintah Daerah (1 Server)	100%	9 Server	800%
		c) Jumlah Aplikasi milik Pemerintah Daerah yang terintegritasi (3 Aplikasi)	100%	3 Aplikasi	100%
		d) Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan TIK/E-Government (1 Regulasi)	100%	1 Regulasi	100%
		e) Jumlah Media Website milik Pemerintah daerah (5 domain/subdomain)	100%	42 Domain	840%
		f) Jumlah Pengunjung website milik pemerintah daerah (190.000 Pengunjung)	100%	315.486	166%
		g) Jumlah e-mail go.id untuk PD dan ASN Pemerintah daerah (43 Akun)	100%	3572 Akun	8.306%
3.	Meningkatnya keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	a) Rasio Jumlah surat radiogram yang diterima dengan yang berhasil didistribusikan	100%	365 Surat	100%
		b) Jumlah Perangkat TIK/PD yang diberikan /dilakukan pengamanan data (54Unit)	100%	54 Unit	100%
4.	Meningkatnya transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Produk Statistik sektoral yang dihimpun dan dipublikasikan kepada masyarakat (1 Buku)	100%	1 Buku	100%

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Penunjang
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	a) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Prosentase jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dalam setahun (4 Jenis Jasa 12 Bulan);	100 %	4 Jenis Jasa	100%
2.	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	Prosentase jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara dalam setahun (1 Unit Mobil)	100 %	1 Unit Mobil	100 %
3.	Tersedianya Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran	Prosentase jumlah Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran dalam setahun (31 orang)	100 %	31 orang	100 %
4.	Tersedianya peralatan kebersihan	Prosentase jumlah peralatan kebersihan dalam setahun (77)	100 %	77Buah	100%
5.	Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik	Prosentase jumlah peralatan Kerja yang terpelihara dalam setahun (43 Unit)	100 %	43 Unit	100 %
6.	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Prosentase jumlah Alat Tulis Kantor tersedia dalam setahun (1 Paket)	100 %	1 paket	100 %
7.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Prosentase jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia dalam setahun (1 Paket)	100 %	1 paket	100 %
8.	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan yang tersedia	Prosentase jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia dalam setahun (17 Buah)	100 %	17 Buah	100%

9	Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai, kegiatan rapat dan konsumsi tamu	a) Prosentase jumlah pegawai yang mengkonsumsi makanan dan minuman dalam setahun (31 orang);	100 %	a) 0	a) 100%
		b) Prosentase jumlah belanja konsumsi tamu yang dibiayai dalam setahun (0 Tamu).	100%	b) 0 Tamu	b) 0%
10.	Tersedianya pembiayaan untuk pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Prosentase jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dalam setahun (31 Orang/ Kegiatan)	100 %	20 Orang/ Kegiatan)	100 %
11.	Tersedianya pembiayaan untuk pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Prosentase jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dalam setahun	100%	65 Kegiatan	65%
12.	Tersedianya peralatan/perengkapan kantor	Prosentase jumlah perlengkapan kantor	100%	0	0%
14.	Meningkatnya kemampuan/keahlian pegawai dalam bidang TIK dan E-Government	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti/ memperoleh pelatihan bidang TIK dan E-Government (15 Pegawai JFU/ JFT)	100%	0 pegawai	0 %
16.	Tersedianya dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja)	Prosentase jumlah jenis pelaporan yang disusun dalam setahun (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja) (6 Jenis Dokumen/Pelaporan)	100%	6 Jenis Dokumen	100%

a. Perbandingan Kinerja

Setelah melihat pencapaian kinerja tahun 2023 berdasarkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023, maka sekarang perlu dilakukan perbandingan pencapaian kinerja dengan target kinerja tahun 2018-2023, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja sampai 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target s/d 2023		Capaian Kinerja 2023	
		Jumlah	(Prosentase)	Jumlah	(Prosentase)
1	3	3	4	5	6
1. Meningkatnya penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis TIK yang disampaikan/ disebarluaskan kepada masyarakat	1. Peningkatan Jumlah dokumen Permintaan Informasi Publik	0 Dokumen	0%	0 dokumen	0%
	2. Peningkatan Jumlah Pengunjung Website milik pemerintah daerah	153.000 Pengunjung	90%	157.632 Pengunjung	103.03%
	3. Peningkatan Jumlah Konten Berita/Artikel yang disebarluaskan kepada masyarakat	2250 Konten	90%	5863 Konten	2.606%
	4. Peningkatan Jumlah Partisipasi masyarakat dalam media sosial resmi pemerintah daerah	2000 Partisipan	90%	3142 Partisipan/ follower	1.571%

		5. Penurunan Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani melalui portal pengaduan/ website	0 pengaduan terlayani	0%	0 pengaduan terlayani	0%
2.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah	1. Peningkatan Jumlah website yang dimiliki SKPD untuk pelayanan informasi publik	20 website	100%	20 Web	100%
		2. Peningkatan Jumlah domain/ subdomain yang dimanfaatkan/digunakan oleh SKPD	20 domain/ Subdomain	100%	20 domain/ subdomain	100%
		3. Peningkatan Jumlah ketersediaan akses internet public	3 akses internet public	100%	1 akses publik	33.33%
		4. Peningkatan Jumlah SKDP yang terkoneksi dengan jaringan internet/intranet	33 SKPD	100%	39 SKPD	118%
		5. Peningkatan Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik	5 Aplikasi/Sistem Informasi	100%	5 Aplikasi/Sistem Informasi	100%
3.	Meningkatnya kapasitas, kualitas dan kuantitas kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bidang TIK	1. Peningkatan Jumlah pelatihan bidang TIK yang diikuti aparatur	0 pelatihan	90%	0 pelatihan	0%
		2. Peningkatan Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan bidang TIK	0 aparatur	00%	0 aparatur	0%
		3. Peningkatan Jumlah Pelatihan/ Bimtek bidang TIK yang diselenggarakan untuk masyarakat	0 pelatihan/ Bimtek	0%	0 pelatihan/ bimtek	0%
4.	Memunculkan dan menumbuhkan komunitas masyarakat dan kewirausahaan bidang TIK	1. Peningkatan Jumlah Komunitas masyarakat dan Kewirausahaan bidang TIK/ekonomi kreatif yang muncul/ tumbuh	2 komunitas/wirausaha ekonomi kreatif	50%	0 komunitas/ wirausaha ekonomi kreatif	0%

3.2 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2023

Analisa capaian kinerja dibatasi pada Program dan Kegiatan Prioritas, karena Program dan Kegiatan Penunjang hanya bersifat rutin yang memang direncanakan sesuai kebutuhan rutin setiap tahunnya. Berikut adalah analisa capaian kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dengan merujuk hasil capaian pada Tabel 3.1 :

1) Tersedianya data informasi produk administrasi kegiatan statistik sektoral untuk melengkapi/mendukung ketersediaan data BPS Daerah;

Bila berorientasi hasil, capaian pada sasaran kinerja ini sangat jauh di bawah target yang ditetapkan. Dari hasil realisasi indikator kinerja menunjukkan bahwa hanya ada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kegiatan survei yang berhasil dilaksanakan pada angka prosentase 89.20%. sedangkan hasil kompilasi produk administrasinya sama sekali tidak terlaksana atau 0%. Dari analisa sementara hal ini mungkin disebabkan kurangnya kemampuan SDM aparatur pada bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait capaian ini.

2) Optimalisasi server eksisting kabupaten untuk penempatan aplikasi SKPD yang diintegrasikan;

Pada sasaran kinerja ini, Dinas Komunikasi dan Informatika dinyatakan berhasil, karena telah mencapai 800% target kinerja yang ditetapkan. Dari target mengoptimalkan 1 server eksisting, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil membangun 8 server baru. Karena server eksisting milik SKPD lain tidak bersedia dihibahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pertimbangan dan alasan masih diperlukan di SKPD asalnya.

3) Tersedianya aplikasi SKPD yang dapat dipergunakan secara online;

Pada sasaran kinerja ini, Dinas Komunikasi dan Informatika dinyatakan berhasil, dan telah mencapai bahkan lebih dari 100% target kinerja yang ditetapkan. Dari target mengintegrasikan 3 aplikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil membangun 1 server dan mengintegrasikan 3 aplikasi. Artinya sasaran kinerja tercapai sebanyak 100%.

4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan TIK dan layanan internet gratis publik di Kantor Kominfo Kab. Barito Timur;

Untuk sasaran ini Dinas Komunikasi dan Informatika juga mencapai target 100% dengan menyediakan 1 akses internet gratis bagi publik, dengan nama Access Point Diskominfo-bartim.id. Sayangnya karena kurang publikasi kepada masyarakat, jumlah pengunjung akses internet gratis ini sangat sedikit. Evaluasi kedepannya perlu upaya publikasi dan promosi keberadaan layanan ini kepada masyarakat, jika perlu memasang plang atau spanduk pemberitahuan di depan kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

5) Tersedianya sarana dan prasarana perangkat TIK pendukung pengelolaan hosting dan domain;

Dari target 21 subdomain website yang ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun 10 website dengan 25 subdomain, atau prosentase capaian sebesar 47.62%. capaian ini bisa dikatakan rendah karena bahkan tidak lebih dari setengahnya target. Namun hal ini dapat dimaklumi karena Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 lebih memprioritaskan kegiatan pembangunan server dan integrasi aplikasi. sehingga SDM dikerahkan untuk melaksanakan prioritas tersebut.

6) Tersedianya Pemasangan Peralatan CCTV yang akan diintegrasikan dengan Command Center Provinsi Kalteng (Berdasarkan Surat Gubernur Kalteng No. 555/925/Diskominfo, Perihal Perubahan Waktu Kewajiban Pemasangan CCTV);

Adanya defisit anggaran menyebabkan kegiatan ini mesti ditangguhkan, sehingga tidak ada kendala bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan apabila anggaranya tersedia. Artinya capaian untuk

sasaran ini 0% bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri.

7) Tersedianya konten informasi publik melalui media website dan helpdesk pelayanan informasi publik;

Kewenangan PPID yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga sasaran ini ditetapkan. Pada prakteknya, penyediaan informasi publik yang seharusnya diselenggarakan oleh Tim PPID yang telah ditetapkan melalui SK Bupati dianggap tidak berjalan. Tidak ada informasi yang dipublikasi baik melalui website dan heldesk layanan informasi. Bahkan fasilitas yang telah diadakan untuk menunjang kegiatan ini pun tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada sasaran ini Dinas Komunikasi dan Informatika dinyatakan tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Perlu upaya melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam pelaksanaan PPID ini agar SDM yang termasuk ke dalam Tim mempunyai kualitas dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi PPID sebagai pelayanan informasi publik di daerah, terkhusus di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sekretariat PPID.

8) Tersedianya kerjasama belanja publikasi/dokumentasi dan advertorial dalam setahun;

Indikator ini berhasil dilaksanakan hingga mencapai prosentasi 100%. Dari 56 item kerjasama yang ditetapkan, 56 item semua terlaksana baik secara fisik maupun keuangan. Yang menjadi perhatian adalah kerjasama tersebut perlu dievaluasi agar advertorial yang dilaksanakan oleh pihak media massa dapat dikontrol dari sisi editorialnya, agar isi konten yang dipublikasi dapat memberi dampak positif bagi citra Pemerintah Kabupaten Barito Timur di masyarakat.

9) Tersedianya konten Informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dalam setahun;

Untuk sasaran ini dapat dinyatakan perbandingan 50:50. Karena dari 4 indikator yang ditetapkan 2 diantaranya dinyatakan berhasil 100% sedangkan sisanya tidak berhasil dengan prosentase 0%. Perlu evaluasi terhadap kegiatan ini, terutama mengenai peningkatan kemampuan SDM dalam mengolah konten yang baik dan menarik untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

10) Tersedianya pelayanan Pengaduan Masyarakat baik secara elektronik dan media konvensional;

Fasilitas layanan pengaduan masyarakat pada tahun 2023 tidak berjalan karena tidak tersedia dana dalam Dokumen Perangkata Daerah. Sebelumnya pengaduan masyarakat disediakan melalui kolom pengaduan di media massa. Kemudian beralih ke media sosial dengan prosedur penanganan pengaduan yang belum pasti atau tidak mempunyai payung hukum yang tetap sebagai landasan hukum pelaksanaan, baik melalui Perbup maupun SK Bupati. Sehingga tidak mengherankan capaian pada sasaran ini 0%. Kedepannya bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi ini harus dapat menyusun kebijakan yang tepat, baik dalam membangun media layanan pengaduan maupun menyusun prosedur dan mekanisme pengaduan yang jelas dalam bentuk produk hukum daerah.

11) Ketersediaan konten informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat melalui media luar ruang dan media elektronik dalam Setahun;

Sebagaimana target penyediaan konten informasi publik melalui media luar ruang yang ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika dinyatakan tidak tercapai, sedangkan penyediaan konten informasi publik melalui media elektronik dinyatakan tercapai dan terlaksana dengan baik sebesar 100%. Ketidak berhasilan tersebut disebabkan Anggaran dan minimnya kemampuan SDM dalam mendesain konten yang baik dan menarik ke dalam bentuk media luar ruang seperti spanduk, baliho, leaflet, brosur dan sebagainya.

12) Tersedianya konten visualisasi informasi pembangunan Kabupaten Barito Timur yang dapat dilihat/ditonton oleh masyarakat;

Pada sasaran ini Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik telah berhasil mencapai target 100% sebagaimana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik diminta untuk menyediakan konten video dokumentasi yang menyajikan perkembangan kemajuan yang telah dicapai Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

13) Tersedianya materi/referensi/ dokumen dalam pengelolaan/ pemanfaatan aplikasi/teknologi persandian;

Sasaran ini sama sekali tidak terlaksana dengan alasan keberadaan SDM yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan bidang persandian, baik aparatur struktural maupun fungsional. Kegiatan hanya dipusatkan pada mengikuti kegiatan rutin rapat-rapat koordinasi seputar persandian yang dilaksanakan di luar daerah. Perlu adanya upaya ekstra dari bidang ini untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan meningkatkan kemampuan SDMnya agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

14) Tersedianya dokumen pemetaan identifikasi indeks keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;

Sama seperti sasaran nomor 13.

15) Tersedianya materi/referensi acuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;

Sama seperti sasaran nomor 13.

3.3 Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Terhadap Target Kinerja Tahun 2013-2018

Untuk membandingkan hasil capaian kinerja pada tahun 2023 terhadap target kinerja 2013-2018, dapat dilihat sebagaimana hasil capaian kinerja yang ditunjukkan pada Tabel 3.3. Analisa dibagi berdasarkan uraian indikator kinerja sebagai berikut :

1) Peningkatan Jumlah Dokumen Permintaan Informasi Publik;

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, setiap Badan Publik/Penyelenggara Negara wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik, karena salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi itu sendiri tidak akan berarti apa-apa bila tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Dengan latar belakang itu, Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada tahun 2014 masih bergabung dalam nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati, dan yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Barito Timur Tahun 2017.

Meskipun demikian, adanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan PPID Kabupaten Barito Timur yang telah terbentuk tidak serta merta meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat terhadap informasi publik.

Sebagaimana Target Kinerja tahun 2013-2018 yang ditunjukkan Tabel 3.3. Target Jumlah Dokumen Permintaan Informasi Publik adalah 100 Dokumen. Sedangkan sampai dengan tahun 2023 tidak pernah ada dokumen informasi publik yang diminta/dimohon secara resmi kepada PPID Kabupaten Barito Timur. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah 0%. Hal ini bukan hanya karena PPID tidak bekerja maksimal, tetapi juga karena tidak adanya animo masyarakat sendiri menggunakan hak memperoleh informasi publik tersebut, hal ini juga mungkin karena PPID sendiri tidak pernah mensosialisasikan dan mempromosikan mengenai hak informasi publik tersebut maupun keberadaan PPID itu sendiri di masyarakat. Sebagai solusi kebijakan seharusnya Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dapat mengalokasi Anggaran untuk diseminasi/edukasi hak informasi publik kepada masyarakat.

2) Peningkatan Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Jumlah pengunjung website sebanyak 215.486 Pengunjung atau capaian target 113.41% dihitung berdasarkan total keseluruhan pengunjung website Pemerintah Kabupaten (<http://baritotimurkab.go.id>), website Dinas Komunikasi dan Informatika (<http://diskominfo.baritotimurkab.go.id>), website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (<http://ppid.baritotimurkab.go.id>), website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (<http://jdih.baritotimurkab.go.id>). Periode waktu dihitung sejak website tersebut di atas aktif yaitu tahun 2015 s/d 2023. Sedangkan website lain belum dapat dihitung karena dianggap masih baru.

Secara prosentase hasil tersebut dianggap sangat memuaskan karena dalam kurun waktu hanya 8 (delapan) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika sudah hampir mencapai target yang ditetapkan sebanyak 215.486 Pengunjung. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh pemisahan nomenklatur komunikasi dan informatika dari Dinas Perhubungan. Meningkatkan animo masyarakat mengunjungi website milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pencapaian pada indikator ini diakomodir dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Pemerintah Daerah.

3) Peningkatan Jumlah Konten Berita/Artikel yang disebarluaskan kepada masyarakat;

Capaian kinerja pada indikator ini terkait langsung dengan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Kegiatan ini

masih menghasilkan capaian yang tidak memuaskan yaitu 22.93%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan jumlah konten berita/artikel yang dihasilkan tahun 2023 ditambah dengan jumlah konten berita/artikel yang telah diproduksi tahun sebelumnya sehingga total menjadi 516 konten. Jumlah tersebut masih jauh dari memuaskan, meskipun sebenarnya Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik telah berupaya mengejar target tersebut di tahun anggaran 2023 dengan menyusun strategi kebijakan yang diyakini efektif, sehingga berani menetapkan target pada tahun 2023 sebanyak 1825 konten berita/artikel atau setidaknya pada tahun 2023 dapat mencapai 81.11% ($1825/2250 \times 100\%$). Namun sebenarnya bisa dikatakan strategi kebijakan yang diambil sudah tepat, hanya saja eksekusinya yang kurang disiplin tepat waktu dan permasalahan administrasi lainnya.

Dengan ditemukannya sumber penyebab kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan strategi kebijakan anggaran dan eksekusi pada tahun berikutnya.

4) Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah;

Target indikator ini dicapai melalui Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil yang dicapai adalah sebesar 103.03% atau 157.632 partisipan/follower dari 153.000 partisipan yang ditargetkan. Prosentase yang dihasilkan sangat jauh dari yang diharapkan. Tingginya angka target yang ditetapkan pada prakteknya diluar dari kemampuan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun peralatan TIK yang bisa dimanfaatkan, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Itu dibuktikan dengan dibuatnya akun media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan *youtube channel*. Pada kenyataannya implementasinya masih jauh dari kata optimal. Kedepannya aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik perlu dilatih dan dibina bagaimana cara melakukan pendekatan yang tepat untuk mengundang animo masyarakat terhadap informasi atau cara yang menarik dalam menyajikan konten informasi sehingga memancing keingintahuan masyarakat. Sehingga otomatis masyarakat akan menghargai, mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dan turut serta berpartisipasi dalam menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial.

5) Penurunan Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Terlayani Melalui Portal Pengaduan/Website;

Kebalikan dari capaian indikator lainnya. Capaian yang diharapkan untuk indikator ini bukan peningkatan tetapi justru bagaimana agar terjadi penurunan, karena apabila terjadi kenaikan pengaduan masyarakat artinya pemerintah daerah justru banyak melaksanakan kegiatan pembangunan maupun pelayanan publik yang merugikan masyarakat.

Yang menjadi kesulitan bagi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik adalah cara mengukur progres penurunannya. Karena trend pengaduan masyarakat yang terjadi di

Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2016 bisa dikatakan sangat kecil/sedikit. Bahkan kasus pengaduan yang disampaikan pun hanya seputar konten informasi pemerintah daerah yang kurang update, serta permasalahan jalan desa/kabupaten yang rusak atau belum beraspal.

Sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.3 hasil yang diperoleh untuk indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat adalah 0%, sedangkan target yang ditetapkan adalah sebanyak 450 pengaduan terlayani atau 90%. Maka jika dihitung prosentase penurunannya adalah sebesar 90%.

Secara analisa angka, hasil ini sangat memuaskan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah memang karena terjadi penurunan pengaduan atau masyarakat tidak tahu bagaimana cara menyampaikan pengaduannya karena sistem pengaduan dibangun oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berbasis online/melalui website, atau bahkan keengganan/ketidak beranian masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya.

Untuk itu kedepannya pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai kegiatan yang mengakomodir pencapaian target kinerja ini, perlu disusun strategi kebijakan penelaahan yang komprehensif dan metode yang empiris untuk mengetahui permasalahan tersebut di atas, misalkan menyusun indeks kepuasan masyarakat atau melakukan survei kepuasan masyarakat agar diketahui benar apakah memang terjadi penurunan pengaduan atau adanya penyebab lain yang belum diketahui.

6) Peningkatan Jumlah website yang dimiliki SKPD untuk pelayanan informasi publik;

Capaian target indikator ini diakomodir oleh Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang menghasilkan capaian target sebesar 100%. Sebelum 20 website yang dimiliki pemerintah daerah hanya ada 4 (empat) yaitu website Pemerintah Kabupaten dan website SPSE Kabupaten Barito Timur, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada waktu itu pengelolaan domain/subdomain maupun website milik pemerintah daerah dikelola/dikuasai oleh rekanan. Namun setelah adanya pemisahan nomenklatur komunikasi dan informatika dari dinas perhubungan pada tahun 2016. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik perlahan mulai berkembang karena dapat menyusun kebijakan anggarannya sendiri. Hal itu dibuktikan dengan diambil alihnya penguasaan domain/subdomain, sehingga website pun dapat dibuat dan dikembangkan sendiri oleh dinas, sampai tahun 2023 jumlah website milik pemerintah daerah bertambah menjadi 20 (dua puluh) website.

Secara prosentase masih dibawah predikat memuaskan. Namun secara statistik, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik telah menunjukkan progres yang meningkat. Dalam waktu 6 (enam) tahun sejak terbentuknya, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berhasil menambah jumlah website aktif milik pemerintah daerah dari 4 (empat) menjadi 20 (dua puluh) website.

7) Peningkatan Jumlah subdomain yang dimanfaatkan/ digunakan oleh SKPD;

Ada 42 (dua puluh) domain/subdomain yang aktif pada tahun 2023. Sehingga total prosentase target tercapai sebesar 200%.

Capaian tersebut bisa dikatakan cukup berhasil, mengingat pengelolaan domain/subdomain baru dikuasai Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada Tahun 2023. Sehingga secara statistik, Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang mengakomodir pencapaian target kinerja ini telah berhasil menunjukkan progres peningkatan kinerja meskipun masih belum tercapai.

8) Peningkatan Jumlah ketersediaan akses internet publik;

Dari target kinerja tahun 2013-2018 yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) akses internet publik, prosentase capaian target yang diperoleh sampai tahun 2023 adalah 100% atau hanya 3 (tiga) akses internet publik berhasil direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Meskipun penyediaan layanan internet publik adalah bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Namun PT. Telkom sebagai mitra kerja pemerintah sudah cukup membantu pemerintah daerah dalam penyediaan layanan internet publik, seperti layanan wifi.id yang sekarang telah tersedia di 2 (dua) titik yaitu di Halaman Kantor Telkom Cabang Ampah dan Cabang Tamiang Layang. Meskipun layanan tersebut berbayar namun tetap terjangkau dengan tarif mulai dari 5000/12 jam, dengan kecepatan akses hingga 100 Mbps (shared bandwidth), sehingga tidak terlalu membebankan masyarakat yang ingin menikmati teknologi internet.

Dengan demikian, jika realisasi capaian target Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik ditambah dengan jumlah layanan internet wifi.id yang disediakan oleh Telkom, maka dapat diasumsikan target sudah tercapai 100%.

Kedepannya, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik akan menyusun kebijakan mengoptimalkan sumber daya TIK yang ada yaitu Tower Radio Link yang ada di longkang (kantor) akan dikoneksikan dengan Tower Radio Link yang berada di lokasi pasar/terminal tamiang layang. Sehingga jika daerah pasar/terminal sudah bisa dikoneksikan dengan layanan internet publik, maka kemudian memudahkan pengembangan titik-titik akses internet publik di lokasi lainnya.

9) Peningkatan Jumlah SKDP yang terkoneksi dengan jaringan internet/intranet;

Dari 33 SKPD yang menjadi target, hanya 118% yang tercapai sampai akhir tahun 2022 atau 39 SKPD yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet tetap.

Jika memperhatikan urusan tugas kewenangan bidang komunikasi dan informatika, sudah jelas bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis TIK (*E-Government*) mesti dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk itu kedepannya, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik akan menginventarisir keberadaan dan kebutuhan belanja internet di seluruh SKPD, kemudian melakukan penataan porsi anggaran belanja internet masing-masing SKPD untuk dipusatkan pada belanja internet Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Sehingga memudahkan untuk mengatur antara kebutuhan dan fungsionalitas internet bagi SKPD. Misalnya dengan mengurangi alokasi kecepatan bandwidth untuk SKPD yang kurang memerlukan internet. Sebaliknya menambah alokasi kecepatan bandwidth bagi SKPD yang sangat membutuhkan internet untuk pelaksanaan

pekerjaannya. Dengan demikian maka anggaran pembiayaan untuk internet akan lebih efektif dan efisien.

10) Peningkatan Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik;

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mengakomodir pencapaian target peningkatan Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Sampai akhir tahun 2023 target indikator kinerja 2013-2018 telah berhasil mencapai prosentase 100%. Peningkatan jumlah aplikasi/sistem informasi didominasi oleh sistem informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti SIMDA Keuangan, SIMDA Perencanaan, SIMDA Pendapatan dan SIMGaji Taspen, keempat aplikasi tersebut berbasis Desktop, sedangkan ada 2 (dua) aplikasi berbasis Web yaitu SIMCAN – Sistem Informasi Perencanaan yang dapat diakses melalui <http://simcan.baritotimurkab.go.id>, dan SIMPONI – Sistem Informasi Perizinan Online yang dapat diakses melalui <http://simponi.baritotimurkab.go.id>.

Sebagaimana target pada tahun 2023 aplikasi tersebut harus terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah berhasil mengintegrasikan aplikasi tersebut ke dalam 1 (server). Sehingga sekarang aplikasi tersebut sudah terkoneksi secara online melalui jaringan internet.

11) Peningkatan Jumlah Komunitas masyarakat dan Kewirausahaan yang Muncul/Tumbuh Dalam Bidang TIK/Ekonomi Kreatif;

Pada prinsipnya target indikator ini lahir dari cita-cita mewujudkan SDM yang berdaya saing, sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas dan inovasi-inovasi baru, baik dari kalangan masyarakat maupun dunia usaha. Karena pada dasarnya banyak hal yang bisa dikembangkan dari pemanfaatan TIK, misalnya pembinaan e-commerce untuk UMKM dengan membuat website belanja online dimana sasaran ini pun selaras dengan misi kepala daerah untuk memberdayakan produktivitas UMKM di Kabupaten Barito Timur. Namun sampai sekarang Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki formula kebijakan yang tepat untuk memfasilitasi pencapaian target kinerja ini. Sehingga target peningkatan jumlah 2 komunitas/wirausaha ekonomi kreatif yang seyogyanya kecil itu pun Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik tidak dapat mencapainya sama sekali.

Strategi kedepannya Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik akan melakukan Strategic Benchmark ke daerah yang telah berhasil mencapai target kinerja serupa. Sehingga paling tidak ada gambaran bagi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk mencapai target tersebut.

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Untuk menghitung sejauh mana Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan berhasil atau tidak, perlu melakukan penghitungan atas tingkat efisiensi penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja yang diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja}}{\text{Target Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Dengan Kategori :

- a) Jika Efektivitas Anggaran < 100%, tetapi Efektivitas Kinerja \geq 100%, maka berarti pelaksanaan Program/Kerja **Sangat Efektif**;
- b) Jika Efektivitas Anggaran = 100%, tetapi Efektivitas Kinerja \geq 100%, maka berarti pelaksanaan Program/Kerja **Efektif Berimbang**;
- c) Jika Efektivitas Anggaran \leq 100%, tetapi Efektivitas Kinerja \geq 75%, maka berarti pelaksanaan Program/Kerja **Cukup Efektif**;
- d) Jika Efektivitas Anggaran \leq 100%, tetapi Efektivitas Kinerja \geq 50%, maka berarti pelaksanaan Program/Kerja **Kurang Efektif**;
- e) Jika Efektivitas Anggaran \leq 100%, tetapi Efektivitas Kinerja < 50%, maka berarti pelaksanaan Program/Kerja **Tidak Efektif**;
- f) Jika Efektivitas Anggaran = 0%, tetapi Efektivitas Kinerja > 0%, maka berarti pelaksanaan Program/Kerja **Efektif Tidak Terukur**;

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(7/3*100)	9
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota	3.557.574.725	1.790.850.177	973.687.406	271.860.800	3.036.398.083	85,35	521.176.642
	Pencapaian Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.701.900	-	46.669.800	-	46.669.800	99,93	32.100
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.293.921.998	1.790.850.177	28.365.000	-	1.819.215.177	79,31	474.706.821
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.468.750	-	16.368.000	-	16.368.000	99,39	100.750
	Administrasi Umum Perangkat daerah	291.293.830	-	247.707.851	22.810.500	270.518.351	92,87	20.775.479
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.688.800	-	544.254.246	-	544.254.246	95,87	23.434.554
	pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.499.447	-	90.322.509	249.050.000	339.372.509	99,38	2.126.938
II.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.696.848.500	-	1.665.477.000	-	1.665.477.000	98,15	31.371.500
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.696.848.500	-	1.665.477.000	-	1.665.477.000	98,15	31.371.500
	- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	35.804.500	-	35.346.500	-	35.346.500	98,72	488.000
	- Layanan Hubungan Media	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	100,00	-
	- penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi Komunitas	1.621.044.000	-	1.590.130.500	-	1.590.130.500	98,09	30.913.500
III.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	387.007.250	-	222.785.482	158.000.000	380.785.482	96,39	6.221.768
	Pengelolaan e Government di Lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota	387.007.250	-	222.785.482	158.000.000	380.785.482	96,39	6.221.768
	Sinergisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah berbasis Elektronik	123.478.680	-	85.987.680	35.999.900	121.987.580	98,79	1.491.100
	- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	221.843.570	-	101.677.802	115.839.600	217.517.402	98,05	4.326.168

	- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41.685.000	-	35.120.000	6.160.500	41.280.500	99,03	404.500
IV.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.667.000	-	82.708.000	24.975.000	77.683.000	92,85	5.984.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingsuap Daerah Kab/Kota	83.667.000	-	82.708.000	24.975.000	77.683.000	92,85	5.984.000
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengelolaan, Analisis, dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	42.973.000	-	37.540.000		37.540.000	87,36	5.433.000
	- Pengembangan Infrastruktur	40.694.000	-	15.168.000	24.975.000	40.143.000	98,65	551.000
V.	Program Penyelenggaraan persandian untuk Penguasaan Informasi	62.213.000	-	61.622.700		61.622.700	99,05	590.300
	Penyelenggaraan persandian untuk Penguasaan Informasi Pemerintah Daerah kab/Kota	52.180.000		52.180.000		52.180.000	100,00	-
	pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten / Kota	52.180.000		52.180.000			0,00	52.180.000
	penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat daerah Kabupaten / Kota	10.033.000	-	9.442.700		9.442.700	94,12	590.300
	Operasionalisasi Jaringan komunikasi Sandi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	10.033.000	-	9.442.700		9.442.700	94,12	590.300
	JUMLAH	5.787.310.475	1.790.850.177	2.976.280.888	454.835.500	6.221.966.265	90,23	865.344.210

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

LKIP Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur. Laporan ini adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2013-2018, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 15 (Lima belas) indikator kinerja.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timurini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kepada pihak-pihak terkait, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, masyarakat Kabupaten Barito Timur, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap pembangunan Kabupaten Barito Timur.

4.2 Saran dan Rekomendasi

a. Saran

Mengingat Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik - merupakan urusan wajib pemerintahan, maka perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM, serta sarana dan prasarana mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bidang komunikasi dan informatika secara optimal.

b. Rekomendasi

Agar peran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dapat optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai *leading sector* penyelenggara TIK dalam lingkup pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan rekomendasi antara lain :

- 1) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik perlu diberikan kewenangan penuh dalam menyelenggarakan, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan TIK SKPD;
- 2) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik perlu diberikan dukungan anggaran yang memadai/proposional, penempatan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian bidang TIK, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendukung kegiatan urusan komunikasi dan informatika;

- 3) Perlu adanya mutasi pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang sesuai kompetensi dan keahlian dalam bidang TIK; dan
- 4) Mendorong SKPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur untuk mewujudkan transparansi informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.